

Press Release**“Dua Tahun Nawacita: Lampu Kuning Daya Saing”**

Jakarta, 20 Oktober 2016

Kantor INDEF

Dalam sembilan agenda utama Pemerintahan Jokowi-JK atau nawacita, beberapa poin bersentuhan langsung dengan aspek ekonomi. Setelah dua tahun agenda ekonomi tersebut dijalankan, INDEF menilai implementasi nawacita di bidang ekonomi masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, agar nawacita ekonomi benar-benar nyata dalam implementasi, INDEF memberikan catatan dua tahun kinerja pemerintah di bidang ekonomi dengan fokus pada aspek Daya Saing, Kemandirian Ekonomi, dan Membangun dari Pinggir. konsumsi yang pada akhirnya menurunkan penerimaan pajak dari PPN maupun PPh Badan.

DAYA SAING

- Memburuknya peringkat daya saing global. Dalam dua tahun terakhir, peringkat *Global Competitiveness Index* Indonesia menurun dari 34 lalu ke 37 kemudian terus turun ke 41. Pemburukan terutama disebabkan oleh aspek istitusi, kesehatan dan pendidikan, inefisiensi pasar, ketersediaan teknologi, kecanggihan bisnis, dan inovasi.
- Paket Ekonomi minim implementasi. Tidak kurang dari 13 Paket Kebijakan telah ditebar guna mendongkrak kinerja perekonomian. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi tetap tidak mampu menunjukkan akselerasi.
- Kemudahan Berbisnis tidak membaik. Dengan segala upaya peningkatan daya saing yang sudah dilakukan pemerintah di sepanjang 2015 dan 2016, peringkat daya saing Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara lain (peringkat di atas 100). Berdasarkan data dari Bank Dunia (2016), peringkat kemudahan melakukan bisnis (*ease of doing business*) yang merupakan salah satu indikator utama tingkat daya saing suatu negara, Indonesia berada di peringkat sangat buncit, yaitu 109, jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga, seperti Malaysia (18), Thailand (49), bahkan tertinggal dibanding Vietnam (90) dan Filipina (103).

- Peran Industri Manufaktur kian luntur. Sekalipun pertumbuhan ekonomi masih berkisar 5%, namun kontribusi sektor industri pengolahan/manufaktur bagi pertumbuhan ekonomi semakin mengalami penurunan. Kondisi ini diperparah dengan implementasi hilirisasi industri yang masih minim sehingga ketergantungan atas hasil ekspor komoditas belum dapat teratasi dan menyebabkan nilai ekspor Indonesia sangat rentan terhadap gejolak perekonomian global.

KEMANDIRIAN EKONOMI

- Ketergantungan Indonesia terhadap barang impor kian tinggi. Impor pangan menunjukkan peningkatan yang semakin signifikan selama 2015 dan 2016 (Semester I). Volume impor migas juga menunjukkan peningkatan sepanjang 2016. Selain ketergantungan terhadap impor pangan dan energi, Indonesia kian diserbu oleh produk industri negara lain, hal ini tercermin dari melonjaknya impor barang konsumsi yang meningkat 12,80 persen sepanjang 2016 (Jan-Sept).
- Industri dalam negeri mengalami kontraksi. Industri domestik cenderung mengalami perlambatan yang ditandai oleh daya serap impor bahan baku dan barang modal yang menurun sepanjang 2016. Impor bahan baku sepanjang 2016 menurun sementara impor barang modal turun 12,6 persen. Di sisi lain, ekspor dari berbagai sektor (termasuk industri) juga kian merosot. Penurunan kinerja industri dalam negeri juga tercermin dari berkurangnya jumlah perusahaan industri.
- Minimnya pengamanan pasar domestik dari serbuan impor. Derasnya aliran impor barang konsumsi dan melemahnya daya saing industri domestik salah satunya disebabkan oleh minimnya kebijakan pengamanan pasar domestik yang tercermin dari kuantitas *Non Tariff Measures* (NTMs). Jika di bandingkan dengan kebijakan NTM AS atau Tiongkok, Indonesia jauh lebih sedikit dengan hanya memiliki 272 jenis NTM, sementara AS dan Tiongkok masing-masing sebanyak 4.780 dan 2.194 NTM.

MEMBANGUN DARI PINGGIRAN

- Pertumbuhan Ekonomi Daerah Merosot. Ketergantungan yang berlebihan terhadap sektor komoditas mentah membuat beberapa daerah seperti Kalimantan Timur dan Riau menghadapi pertumbuhan yang rendah bahkan negatif.
- Pembangunan antar Wilayah masih Timpang. Wajah ketimpangan pembangunan tercermin dari meningkatnya porsi Jawa terhadap pembentukan PDB. Per triwulan II 2016, porsi Jawa sudah mencapai 58,8%, sementara Kalimantan terus mengalami penurunan menjadi 7,61%. Investasi sebesar 52% juga masih tersedot di pulau Jawa. Dus, pembangunan sifatnya masih Jawa sentris.
- Penurunan Kesenjangan dan Kemiskinan Semu. Angka kesenjangan yang menurun bersifat semu. Faktanya penurunan kesenjangan lebih didorong faktor rendahnya konsumsi pada masyarakat kaya bukan karena naiknya pendapatan masyarakat miskin. Begitu juga dengan kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan semakin tinggi jadi bukti bahwa orang miskin makin dalam jatuh ke jurang kemiskinan.
- Kesempatan Kerja Semakin Kecil. Pertumbuhan ekonomi makin kurang berkualitas. 1% pertumbuhan ekonomi hanya mampu menciptakan 110 ribu lapangan kerja. Di tahun 2011 menyerap 225 ribu orang. Dulu saat boom commodity 1% pertumbuhan mampu menyerap 500 ribu orang.
- Petani Jauh dari kata Sejahtera. Nilai tukar petani (NTP) selama 2 tahun Pemerintahan Jokowi-JK stagnan. Per September 2016 NTP gabungan berada diposisi 102,02 jadi bukti bahwa daya beli petani masih lesu.

Sarwo Edhie (+62813 8047 7878)